

Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi

Oleh Yudha Putra G
Admnegara08@gmail.com

Dibawah bimbingan Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Abstract

District Padang Hilir is a district that the economy and infrastructure are still concerned. This is due to the area where previously have become illegal logging by the company, so that when the forest has been damaged people's income is low which makes local people were powerless because often affected by flooding. District Padang Hilir community who have small businesses are often constrained by lack of capital production which is making it difficult to compete with employers who have a substantial capital. Though the passage of social economy greatly supported by the household-scale enterprises.

The purpose of this study is to know how policy implementation program Urban Poverty in District Padang Hilir Tebing Tinggi City and see what factors inhibiting the implementation of program policies Urban Poverty in District Padang Hilir Tebing Tinggi City. Theory (approach) is used as a tool of analysis in this research is the theory of policy implementation and theory on Poverty. While the methods used in this research is descriptive qualitative research which is intended to provide a systematic overview of the observed phenomenon.

Based on these results, policy implementation program Urban Poverty in District Padang Hilir Tebing Tinggi City can be seen from the creation of self-reliance among society so that they are able to early detection of problems that they face and to seek the real solution to these problems. If the infrastructure goes as expected and the availability of access to economic information for the community is a way to achieve the the welfare of community. Inhibiting the implementation of program policies Urban Poverty in District Padang Hilir Tebing Tinggi City is a community empowerment is at the core of this program is not maximized, so despite being physically able to work but it would be better to be able to develop the infrastructure of the community is a cornerstone of the economy improvement. P2KP is the way to empowerment with all the programs it offers. Other perceived difficulties in running this program due to the lack of real cooperation is highly expected the smooth running of of this program, especially the participation of the community in its implementation. Community facilitators sometimes feel as a contractor that specializes in

infrastructure development, in fact the Community Facilitators who cooperation with the local community is a major goal of this program.
Keywords: Policies, Empowerment, Facilitators, Community.

LATAR BELAKANG MASALAH

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara. Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Pesisir terdiri dari 6 (enam) kelurahan. Kecamatan ini mendapat bantuan P2KP dengan jumlah bantuan seluruhnya sebesar Rp. 3 Milyar, yang dengan demikian jumlah bantuan untuk masing-masing kelurahan sebesar Rp. 500 Juta. Dana tersebut diambil dari dana APBN. Dipilihnya kecamatan ini sebagai lokasi penelitian adalah karena secara infrastruktur Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi merupakan kecamatan yang infrastrukturnya masih memprihatinkan. Ini disebabkan wilayah ini adalah langganan banjir tiap tahunnya sehingga tidak sedikit masyarakat yang dirugikan dengan kondisi tersebut.

Dipilihnya kecamatan ini sebagai lokasi penelitian tentang P2KP karena:

1. Kecamatan Padang Hilir merupakan kecamatan yang ekonomi serta infrastrukturnya masih memprihatinkan. Ini disebabkan wilayah ini dahulunya tempat penebangan liar oleh perusahaan, sehingga ketika hutan telah rusak pendapatan masyarakat pun menjadi rendah yang membuat masyarakat setempat tidak berdaya karena sering terkena banjir.
2. Masyarakat kecamatan Padang Hilir yang memiliki usaha kecil sering terkendala dengan kurangnya modal produksinya sehingga sulit bersaing dengan pengusaha yang memiliki modal yang besar. Padahal berjalannya ekonomi kerakyatan sangat ditopang oleh usaha yang berskala rumah tangga.
3. Sejauh pantauan penulis saat ini, organisasi perdesaan atau usaha sebagai bukti nyata berdayanya masyarakat di Kecamatan Padang Hilir masih minim dan belum terlihat.

Berdasarkan kondisi dan fenomena yang tergambar di atas serta wilayah Kecamatan Padang Hilir yang dinilai masih dekat dengan kemiskinan maka penulis tertarik untuk melihat pengaruh P2KP yang merupakan upaya pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat di kecamatan ini.

KONSEP TEORITIS

Implementasi Kebijakan

Hoogerwerf, (1983:10) mengemukakan pendapatnya bahwa meskipun upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga menjadi sasaran atau tujuan yang diburu oleh berbagai organisasi swasta baik secara langsung maupun melalui pemerintah, namun kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi publik adalah berbeda, oleh karena pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi terhadap tujuan-tujuan tersebut yaitu kedaulatan.

Selanjutnya menurut Wibawa dkk (2003:4), bahwa untuk mengopersionalisasikan kebijakan publik, birokrasi pemerintah menginterpretasikan kebijakan tersebut menjadi program. Jadi program dapat dipandang sebagai kebijakan birokratis karena dirumuskan oleh birokrasi. Parker (dalam Sunggono, 2003:22) mengatakan bahwa :

Kebijaksanaan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian prinsip, atau tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan beberapa subjek atau sebagai tanggapan terhadap beberapa krisis.

Dari beberapa pengertian di atas, pada dasarnya kebijakan pemerintah itu harus mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Islamy (2002:20) mengemukakan pendapatnya bahwa kebijakan pemerintah (*public policy*) adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Dalam proses kebijakan publik, pemerintah harus memperhatikan serangkaian tahap atau beberapa langkah, yang menurut para ahli kebijakan publik berbeda-beda dalam mengelompokkan tahap-tahap tersebut. Edi Suharto (2008:14), menyatakan bahwa dalam proses kebijakan terdiri dari beberapa langkah yaitu; *policy germination* (kebijakan bertunas), *policy recommendation* (tahap rekomendasi), *policy analysis* (penganalisaan kebijakan), *policy formulation* (perumusan kebijakan), *policy decision* (tahap pengambilan keputusan), *policy implementation* (pelaksanaan kebijakan), dan *policy evaluation* (penilaian kebijakan). Selanjutnya Edi Suharto menjelaskan bahwa umumnya proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan ke dalam enam tahap sebagai berikut :

1. Pendefinisian masalah (*policy formulation*).
2. Penentuan agenda (*agenda setting*).
3. Perumusan alternatif kebijakan (*policy formulation*).
4. Pemilihan alternatif kebijakan (*policy adoption*).
5. Pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*).
6. Penilaian kebijakan (*policy evaluation*).

Dari tahapan-tahapan tersebut di atas yang akan menjadi fokus dalam pembahasan ini tulisan ini adalah pada tahap pelaksanaan

kebijakan (*policy implementation*). Sebuah kebijakan yang tersusun dengan baik akan lebih terarah, namun memerlukan waktu untuk berkembang dan seharusnya tetap memperhatikan hal-hal seperti yang dikemukakan oleh Winardi (2004:120) sebagai berikut:

1. Memungkinkan penafsiran terbuka dan penilaian.
2. Bersifat konsisten dan tidak boleh ada dua kebijakan yang saling bertentangan dalam suatu organisasi.
3. Harus sesuai dengan keadaan yang berkembang.
4. Harus membantu pencapaian sasaran dan harus dibantu dengan fakta-fakta yang objektif.
5. Harus sesuai dengan kondisi-kondisi eksternal.

Kebijakan publik selain dapat menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah dalam masyarakat dapat pula menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk, cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Konsep kebijakan publik (*public policy*) menurut Sulaeman (1998:24), adalah sebagai suatu proses yang mengandung pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, konsep *public policy* berhubungan dengan pola aktifitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung

Metode Penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya, maka penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadi suatu sapek fenomena sosial tertentu, sekaligus pula mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu melalui uraian-uraian. Fenomena tersebut didapat pada identifikasi penulis terhadap wilayah tertentu di Kecamatan Padang Hilir yang mendapat bantuan P2KP namun masyarakatnya masih belum dapat diberdayakan.

Penelitian deskriptif seperti biasanya dilakukan tanpa suatu hipotesa tertentu yang dirumuskan secara ketat, walaupun menggunakan hipotesa tetapi bukan dari hasil uji secara statistik. Oleh karena itu, penelitian deskriptif berupa menjabarkan atau menganalisis, maka sifat penelitian yang digunakan disini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu keadaan (obyek) dan di dalamnya terdapat upaya deskriptif, pencatatan dan analisis berdasarkan teori-teori yang relevan.

Data yang penulis peroleh baik data primer maupun sekunder selanjutnya dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya masing-masing, kemudian data tersebut diolah dan dianalisa menurut teori dan uraian sesuai dengan metode analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, *people centred, participatory, empowering, and sustainable* (Chambers, 1995: 88).

Pemberdayaan Sebagaimana sasaran utama P2KP ini seperti yang telah disinggung sebelumnya yang meliputi 4 hal, yakni:

1. Berkurangnya beban pengeluaran masyarakat
2. Terbukanya akses ekonomi masyarakat miskin yang meliputi akses informasi dan infrastruktur
3. Meningkatnya kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
4. Berkembangnya usaha ekonomi mikro masyarakat miskin

1. Berkurangnya Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin

Pengeluaran adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Pengeluaran ini secara rutin berlangsung dan jumlahnya kian hari kian meningkat. Pengeluaran ini menjadi persoalan serius ketika pendapatan masyarakat miskin tidak mencukupi untuk mengimbangi pengeluarannya, yang pada akhirnya masyarakat miskin tersebut menekan biaya pengeluarannya atau meminjam kepada tetangga. Dengan keadaan seperti itu yang berlangsung secara terus menerus menjadikan kemiskinan kian parah menjerat masyarakat. Maka melalui P2KP diharapkan kedepannya beban pengeluaran masyarakat bisa berkurang melalui program-program yang dicanangkan seperti strategi mencari tambahan pendapatan, cara mengidentifikasi kebutuhan dan cara manajemen hidup ke depan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang Fasilitator Masyarakat di Kecamatan Padang Hilir berisial AA, penulis mendapat kejelasan mengenai poin berkurangnya beban pengeluaran masyarakat miskin ini. AA mengatakan bahwa berkurangnya beban pengeluaran masyarakat ini tidaklah dirasakan secara langsung sebagaimana program pemerintah lainnya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun berkurangnya beban tersebut akan dirasakan ke depan ketikan program manajemen masyarakat tersebut sudah mampu dipraktikkan oleh masyarakat miskin itu sendiri. Ia mencontohkan jika dulunya masyarakat miskin mengalami kesulitan keuangan karena

pengaturan keuangan yang amburadul, maka melalui penyuluhan manajemen pada program masyarakat miskin lebih tahu dan mengerti bagaimana mengelola keuangannya, dengan demikian kesulitan lambat laun akan berkurang. Berikut kutipan wawancaranya:

“Berkurangnya beban pengeluaran masyarakat tidaklah dapat dilihat begitu program ini dijalankan, melainkan melalui proses yang dialami oleh masyarakat miskin itu sendiri. Kita memberikan ilmu manajerial hidup kepada masyarakat mengenai pengaturan keuangan dan lain sebagainya sehingga ke depan mereka mandiri dalam berpikir dan bertindak, yang pada akhirnya beban pengeluaran mereka akan teratasi dengan pendapatan”. (**Wawancara dengan AA, 37, 13 Desember 2012**).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian pengurangan beban pengeluaran masyarakat adalah bersifat jangka panjang yang keberhasilannya sangat tergantung pada kemauan masyarakat miskin tersebut untuk hidup mandiri dan teratur. Maka dari itulah tujuan program ini adalah terutama untuk mengubah pola pikir masyarakat dari yang sebelumnya hanya menerima nasibnya, maka dengan adanya program ini, ke depannya masyarakat mampu mengidentifikasi dan mencari jalan keluar persoalan yang mereka hadapi dengan mandiri dan kreatif.

2. Terbukanya Akses Ekonomi Masyarakat Miskin yang Meliputi Akses Informasi dan Infrastruktur

Infrastruktur serta ketersediaan informasi tentang ekonomi merupakan faktor kunci berjalannya roda perekonomian. Infrastruktur seringkali menjadi masalah bagi masyarakat untuk memasarkan apa yang telah dihasilkan, sehingga dengan keadaan demikian masyarakat memasarkan apa yang dihasilkannya tersebut seadanya saja, dan ditambah lagi ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan keterbatasan infrastruktur tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Demikian halnya juga yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Padang Hilir. Keadaan infrastruktur yang memprihatinkan membuat akses masyarakat terhadap dunia luar menjadi terbatas yang tentunya berpengaruh pada pendapatan warga.

Di Kecamatan Padang Hilir masih banyak ditemui jalan-jalan yang belum dilakukan pengaspalan, jalan-jalan di sekitar perumahan warga yang belum dilakukan semenisasi, serta jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat sudah banyak yang rusak. Kondisi ini diperparah dengan kondisi alam di Kecamatan Padang Hilir yang tiap tahunnya menjadi langganan banjir yang mempercepat kerusakan infrastruktur yang telah dibangun. Inilah salah alasan utama diprogramkannya P2KP di Kecamatan ini.

Peran P2KP di Kecamatan Padang Hilir terutama dalam hal penyediaan infrastruktur disambut baik oleh warga, berdasarkan hasil

wawancara penulis di lapangan kepada salah seorang warga berinisial AH, didapat keterangan bahwa kehadiran P2KP hendaknya terus berlangsung hingga keadaan infrastruktur di Kecamatan Padang Hilir kian membaik. Pria 43 Tahun yang berprofesi sebagai Pedagang Sayuran ini mengaku selama ini kesulitan untuk memasarkan sayurannya karena sulitnya akses terutama infrastruktur dan informasi pemasaran, maka dengan adanya P2KP sedikit banyak akses tersebut terbuka sehingga ekonomi bapak tiga anak ini meningkat. Berikut kutipan wawancaranya:

“ Kehadiran P2KP terutama bagi warga yang ekonominya pas-pasan sangat membantu, karena selama ini persoalan kesulitan hidup warga bukanlah hanya karena warga tersebut malas, tetapi akses yang terbatas seperti jalan-jalan yang rusak, banjir yang tiap tahun datang juga menjadi kendala bagi warga untuk meningkatkan taraf hidupnya”.
(Wawancara dengan AH, 43, 13 Desember 2012).

Dengan demikian, salah satu dampak positif dari P2KP adalah mempermudah akses warga baik melalui infrastruktur maupun suprastruktur. Terutama infrastruktur, adanya P2KP menjadikan akses warga menjadi lancar dan secara otomatis menjadi penunjang dalam ekonomi warga.

3. Meningkatnya Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin

Terbukanya akses informasi dan infrastruktur seperti yang tergambar pada poin sebelumnya, maka pada poin ini penulis mencoba melihat pengaruh P2KP terhadap hal yang lebih riil yakni meningkatnya kemampuan dan pendapatan secara nyata bagi masyarakat miskin di Kecamatan Padang Hilir.

Tujuan utama P2KP adalah terciptanya kemandirian di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka mampu mendeteksi secara dini masalah yang mereka hadapi dan dapat mencari solusi nyata dari masalah tersebut. Jadi P2KP adalah pemberi bekal kepada masyarakat agar bias memecahkan persoalannya sendiri. Jika pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta tersedianya akses informasi ekonomi bagi masyarakat adalah merupakan jalan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah tersedianya akses tersebut benar-benar diterapkan oleh masyarakat atau hanya sekedar pelengkap saat program ini berlangsung.

Keterangan dan harapan terlontar dari seorang Fasilitator Masyarakat berinisial AM. Mengenai hal ini pria yang menangani masalah ekonomi P2KP menjelaskan bahwa P2KP menginginkan masyarakat mandiri yang mampu berkarya sepeninggal program ini. Akses dan caranya telah diberikan, tinggal masyarakat bagaimana melaksanakannya. Berikut kutipan wawancaranya:

“Tujuan utama P2KP adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui pemberian program-program yang riil.

Sehingga sepeninggal kami nantinya masyarakat dapat berjuang dan menghasilkan perekonomian yang baik. Jika hal ini tidak tercapai maka program ini akan dinilai gagal meskipun kondisi infrastruktur membaik, karena esensinya adalah membuat masyarakat berdaya”. **(Wawancara dengan AM, 17 Desember 2012).**

Perberdayaan masyarakat merupakan inti dari program ini, jadi meskipun secara fisik dapat dilihat berhasil tetapi akan lebih baik lagi masyarakat mampu mengembangkan infrastruktur tersebut menjadi landasan perekonomian yang membaik. P2KP adalah jalan menuju pemberdayaan tersebut dengan segala program yang ditawarkannya.

4. Berkembangnya Usaha Ekonomi Mikro Masyarakat Miskin

Harapan lain dengan adanya P2KP adalah dengan berkembangnya usaha ekonomi mikro di tengah-tengah masyarakat. P2KP memberikan modal berupa pembinaan terhadap masyarakat dalam mengelola keuangan serta mengembangkan usaha yang digelutinya. Jika program ini berhasil maka secara langsung akan berdampak baik bagi kehidupan ekonomi masyarakat terutama ekonomi skala kecil.

Sejauh ini, Fasilitator Masyarakat memberikan pembinaan secara rutin kepada beberapa Kepala Keluarga (KK) agar usaha yang digelutinya tersebut dapat bertahan atau bahkan berkembang sesuai dengan tuntunan saat ini. Menurut salah seorang Fasilitator Masyarakat berinisial JN yang merupakan penyuluh usaha mikro ini, P2KP diharapkan dapat menjadi landasan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya melalui pembinaan-pembinaan yang dilakukan secara berkala. Melalui pembinaan tersebut masyarakat miskin akan diajarkan bagaimana mengelola keuangan usaha kecilnya sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih daripada sebelumnya. Berikut hasil wawancaranya:

“P2KP juga memprogramkan upaya peningkatan terhadap usaha mikro masyarakat miskin melalui pembinaan-pembinaan secara berkala, jika ini berhasil maka masyarakat tersebut akan lebih mandiri dalam mengelola keuangannya serta menghasilkan keuntungan yang lebih dari saat sekarang, sehingga dengan demikian kemiskinan akan berkurang”. **(Wawancara dengan JN, 1 Januari 2013).**

Inilah salah satu contoh bahwa P2KP juga bermanfaat sebagai penunjang usaha ekonomi warga, terutama usaha mikro yang sering terkendala dengan masalah permodalan. Masalah modal sering menjadi kendala masyarakat, terutama yang memiliki usaha kecil, mereka kesulitan mengembangkan usahanya karena tersandung masalah permodalan. Jika meminjam kepada pihak lain maka akan dipatok dengan bunga yang tinggi yang nantinya akan menambah beban hidup mereka. Maka dengan adanya P2KP ini, kesulitan itu tidak ditemukan lagi, pinjaman lunak dengan cicilan yang ringan akan mengurangi beban

mereka dan dengan perlahan mereka dapat meningkatkan produksi usahanya.

A. Kesimpulan

2. Implementasi kebijakan program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dapat dilihat dari terciptanya kemandirian di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka mampu mendeteksi secara dini masalah yang mereka hadapi dan dapat mencari solusi nyata dari masalah tersebut. Jadi P2KP adalah pemberi bekal kepada masyarakat agar bias memecahkan persoalannya sendiri. Jika pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta tersedianya akses informasi ekonomi bagi masyarakat adalah merupakan jalan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah tersedianya akses tersebut benar-benar diterapkan oleh masyarakat atau hanya sekedar pelengkap saat program ini berlangsung.

2. Penghambat pelaksanaan kebijakan program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi adalah perberdayaan masyarakat merupakan inti dari program ini belum maksimal, jadi meskipun secara fisik dapat dilihat berhasil tetapi akan lebih baik lagi masyarakat mampu mengembangkan infrastruktur tersebut menjadi landasan perekonomian yang membaik. P2KP adalah jalan menuju pemberdayaan tersebut dengan segala program yang ditawarkannya. Kesulitan lain yang dirasakan dalam menjalankan program ini juga disebabkan kurangnya kerjasama yang sebenarnya sangat diharapkan dalam kelancaran program ini terutama ikut sertanya masyarakat dalam pelaksanaannya. Fasilitator masyarakat terkadang merasa sebagai kontraktor yang secara khusus melakukan pembangunan infrastruktur, padahal sebenarnya Fasilitator Masyarakat yang bekerjasama dengan masyarakat setempat merupakan tujuan utama diadakannya program ini.

B. Saran

Berikut ini penulis mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian:

1. Program yang telah dinilai berhasil sejauh ini hendaknya dipertahankan serta ditingkatkan agar kondisi kemiskinan yang merupakan persoalan inti di Kecamatan Padang Hilir dapat teratasi.

2. Pemberdayaan masyarakat yang belum sepenuhnya berhasil harusnya menjadi pekerjaan rumah bagi Fasilitator Masyarakat, karena meskipun secara fisik program ini berhasil akan sia-sia apabila masyarakat belum mampu mengetahui masalah yang dihadapinya sendiri.

3. Pembangunan infrastruktur, Program Pembinaan yang telah berhasil hendaknya dijaga oleh masyarakat agar menjadi percontohan oleh masyarakat luar serta generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hoogerwerf, Dennis. 2001. *Implementasi Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Islamy, Irfan, M. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka Cidessindo.

Mochtar, M. 2002. *Diktat Kuliah Pengantar Statistik*, Jakarta : Percetakan Karya Bhakti.

Melly G. Tan, 2001. *Perempuan dan Pemberdayaan*. Bandung: Rineka Cipta.

Mubyarto, Moenir. 1994. *Kemiskinan Perkotaan*. Bandung: Pustaka Jaya

Mustopadidjaja. 1992. *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: Pustaka Kendi.

Rasyid, Ryaas. 2002. *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya.

Santoso, Ahmad. 1998. *Kisi-Kisi Kebijakan*. Bandung: Rineka Cipta.

Soetrisno, Suyatno.1990. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Harapan.

Soewargono, Windarto.1997. *Kebijakan Publik*. Bandung: Ganesha Exact.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sulaeman, Affan. 1998. *Diktat Kebijakan Pemerintah*, Bandung : BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama Unpad – IIP.

Sumodiningrat, Gunawan, Budi S. dan Mohamad Maiwan, 1999. *Kemiskinan, Teori, Fakta, dan Kebijakan*, Jakarta: Impac.

Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi, Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan*, Bandung : Humaniora Utama Press.

Usman, Arifin.2003. *Kebijakan dan Administrasi Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta : Rineka Cipta.

Wibawa, Samodra. Purbokusumo, Yuyun. Pramusinto, Agus. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Winardi, Ahmadi. 2001. *Manajemen Kebijakan*. Bandung: Rineka Cipta.

Dokumen:

Buku Pedoman Umum P2KP, Edisi Oktober 2009

Modul 1 sampai 9, *Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan*, Sekretariat P2KP Pusat Tahun 2009

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2008 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2008 mengenai Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota